

PENDIDIKAN ISLAM DI SUDAN

Murjani

STAI Darul Ulum Kandangan, Kal-Sel, Indonesia
murjani.tarsa@gmail.com

ABSTRACT

The entry of Islam in Africa began at the time of the Prophet Muhammad when there was the first contact between Islam and Africa, namely after the friends moved to Habsyi and received a good reception from the king of Najjasyi and the local population. The spread of Islam was then continued during the Caliph Umar Ibn Khattab by sending Amr ibn 'Ash. The development of Islam has been stronger since Sudan was under the Ottoman Turks starting in the 16th century and under Egyptian rule since 1822. Almost all citizens of northern Sudan adhere to Islam, while the southern part of Sudan until now the majority of the population is Christian and some (17%) remain. as a follower of the teachings of watsani (animist).

Keywords: Education, Islam, Sudan.

ABSTRAK

Masuknya Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapatkan sambutan baik dari raja Najjasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab dengan mengutus Amr ibn 'Ash. Perkembangan Islam semakin kuat sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822. Hampir seluruh warga Sudan utara menganut agama Islam, sedang Sudan bagian selatan hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran *watsani* (animis).

Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Sudan.

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara sangat tergantung kepada kepedulian negara tersebut terhadap pendidikan. Demikian pula merosot atau keterbelakangan suatu negara terletak pada ketidakpedulian negara terhadap pendidikan (Thohir Luth, 1999). Dalam pengalaman sejarah, tidak ada satupun negara mampu mencapai kemajuan yang hakiki tanpa didukung penyempurnaan pendidikan. Negara-negara Eropa yang terkenal sebagai kawasan negara-negara yang maju sebenarnya sebagai akibat dari pembangunan pendidikannya. Adapun faktor-faktor lainnya seperti ekonomi, politik, dan keamanan juga mendukung tetapi bukan sebagai faktor kunci utamanya (Mujamil Qomar, 2005).

Demikian pentingnya eksistensi pendidikan bagi suatu bangsa dan negara, maka bidang pendidikan harus memperoleh perhatian serius oleh setiap rezim pemerintahan yang berkuasa. Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang maju,

yang tidak didukung pendidikan yang kuat. Oleh karena itu, untuk menjadi negara yang kuat, maju dan disegani dunia internasional, maka pendidikan harus dijadikan sebagai bidang unggulan.

Sudan merupakan negara multi agama dan multi etnis yang memiliki perbedaan kelas sosial ekonomi antara kaum Arab dan Afrika serta merupakan bangsa penggembala dan petani, kegiatan gembala berlangsung di Sahil, sebuah padang rumput yang bersebelahan dengan Sahara (Ira M. Lapidus, 1999). Sejak meraih kemerdekaannya dari penjajahan Mesir dan Inggris pada 1 Januari 1956, Sudan dilanda oleh berbagai macam krisis (Richard Martin, 2004).

Islam (C. E. Bosworth, 1983) Sunni merupakan agama resmi dan terbanyak dianut masyarakat Sudan (Binti Maunah, 2011). Bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara ini secara *de jure* dan bahasa Inggris secara *de facto*. Pendidikan di Sudan digratiskan dan diwajibkan bagi seluruh anak-anak usia 6 sampai 13 tahun. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar selama dari delapan tahun, kemudian pendidikan menengah tiga tahun. Sudan juga mempunyai banyak universitas ternama yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Bahasa pengantar pendidikan yang digunakan di semua tingkatan adalah bahasa Arab. Lokasi sekolah terkonsentrasi di sejumlah daerah perkotaan, yang mana sejumlah sekolah yang terletak di bagian Selatan dan Barat telah rusak bahkan hancur akibat konflik di negara tersebut (Nostalgawan Wahyudhi, 2016).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan dengan Pendidikan Islam di Sudan.

METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai pendidikan Islam di Sudan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif-analitik melalui kajian secara filosofis dengan pendekatan kualitatif-rasionalistik (Sumadi Suryabrata, 2008). Sumber yang penulis gunakan adalah sumber tertulis yang merupakan sumber sekunder. Oleh karena itu, penulis melakukan teknik studi literatur untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam makalah ini.

Sejarah Berdirinya Sudan Sejarah Sudan

Sudan adalah negara terbesar di benua Afrika yang mempunyai keragaman suku, ras dan agama. Keragaman yang seharusnya menjadi penyeimbang dan harmoni yang kuat berubah menjadi suatu masalah dan petaka yang berkepanjangan bagi wilayah bekas jajahan Inggris ini (Michelle Bison, 1977). Pendudukan Inggris terhadap Sudan berdampak panjang pada perjalanan sejarah bangsa ini.

Pemerintahan kolonial Inggris di Sudan berlangsung lama, hingga akhirnya Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris tanggal 1 Januari 1956 (Abdul Rahman Abu Zayed Ahmed, 1988). Isu tentang status dan masa depan Islam tetap merupakan agenda politik, baik bagi kelompok maupun individu yang berupaya memperjuangkan negara sekuler, multinasional, multireligius untuk mengakhiri perang saudara antara utara dan selatan yang pecah setelah Sudan merdeka (Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, 2004).

Pengelompokan antara Sudan bagian utara dan selatan yang berlatar belakang ras dan agama yang berbeda menjadi titik awal dimulainya pertikaian dan ketegangan yang menjadikan Sudan dilanda konflik (Alo Liliweri, 2005) berkepanjangan. Penduduk dari wilayah selatan sering kali tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan dan pengambilan kegiatan politik (Deng D. Akol Ruay, 1994; Charles Gurdon, 1989).

Perang sipil pertama terjadi pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1972. Perang antara utara dan selatan sempat terhenti beberapa waktu setelah dikeluarkannya perjanjian Addis Ababa. Perjanjian Addis Ababa, dinegosiasikan pada bulan Februari 1972 antara *Government of Sudan* (GoS) dan *the Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A). Suatu perjanjian penghentian perang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ideologi politik (Miriam Budiardjo, 1977) Sudan mengalami perubahan pada masa kepemimpinan Presiden Jafaar Muhammad an-Numeiry setelah disepakatinya persetujuan Addis Ababa. Persetujuan yang ditandatangani tahun 1972 ini berisi kewenangan bagi Sudan bagian selatan untuk mendirikan badan legislatif dan eksekutif secara terpisah dari pemerintah pusat yang ada di utara (Douglas Hamilton Johnson, 2011).

Akhir dari perang sipil yang kedua (Douglas Hamilton Johnson, 2011) menandai awal era baru bagi perjalanan sejarah kedua wilayah yaitu utara dan selatan. Perang sipil kedua berhenti setelah terjadi kesepakatan antara pihak SPLM/A selaku tentara perjuangan dari wilayah selatan dengan wakil presiden pada saat itu yang mewakili pemerintahan utara. Kesepakatan antara kedua belah pihak tertuang dalam perjanjian CPA berisikan point penting yang salah satu isinya membolehkan wilayah selatan untuk melakukan referendum (Douglas Hamilton Johnson, 2011) setelah 6 tahun masa interim untuk menentukan apakah Sudan tetap menjadi satu negara atau wilayah selatan memilih untuk merdeka.

Kondisi Geografis Sudan

Sudan adalah negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Sebelum referendum yang memisahkan Sudan menjadi dua bagian, Sudan merupakan negara terluas di Afrika dan di daerah Arab, serta terluas kesepuluh di dunia (Ajid Thohir, 2011). Negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur laut, Kongo dan Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut. Ibu kota negara ini adalah Khartoum yang merupakan pusat politik, kebudayaan, dan perdagangan. Sementara Omdurman sebagai kota terbesarnya dengan jumlah populasi sebesar 42 juta jiwa (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>).

Sudan meliputi daratan yang sangat luas dengan gurun Sahara di sebelah utara, daerah pengunungan di wilayah Sudan timur dan barat, serta rawa-rawa dan hutan hujan tropis yang sangat besar di daerah selatan. Sudan selatan beriklim tropis, sedangkan di utara beriklim kering dan tandus, karena daratannya didominasi oleh padang pasir. Titik terendah Sudan adalah Laut Merah yaitu 0 m, sedangkan titik tertinggi di Sudan adalah puncak gunung Kinyeti, yaitu sekitar 3.187 m (<http://chievpippo.blogspot.co.uk/2010>).

Kondisi Sosial dan Ekonomi Sudan

Populasi penduduk Sudan hingga Juli 2008 diperkirakan sebesar 40.218.455 jiwa. Angka kelahiran sebesar 34,31 kelahiran per 1.000 jumlah penduduk dan kematian sekitar 13,64 kematian per 1.000 jumlah penduduk. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam

kelompok etnik yang berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52%, Arab 39%, Beja 6%, dan lain-lain sebanyak 3%. Penduduk di wilayah utara Sudan mayoritas memeluk agama Islam (70%), sebanyak 5% memeluk agama Kristen dan kebanyakan berdomisili di selatan Sudan, sementara 25 % penduduk lainnya masih memegang teguh kepercayaan asli. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab, disamping masih juga menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic (<http://chievpippo.blogspot.co.uk>).

Perekonomian Sudan meningkat seiring dengan tingginya produksi minyak dan harga minyak yang kian melambung tinggi (Adam Mynott, 2017; Paul Reynolds, 2017). Namun, konflik internal yang menimbulkan perang saudara selama dua dekade di selatan meningkatkan garis kemiskinan pada pendapatan perkapita masyarakat Sudan.

Menurut data tahun 2005, Sudan memproduksi minyak sekitar 401.000 barel setiap hari yaitu sekitar 1,9 miliar dollar. Dengan adanya resolusi 21 tahun perang saudara, masyarakat Sudan kini dapat memperoleh keuntungan dari sumber daya alamnya, membangun kembali infrastrukturnya, menaikkan produksi minyak, dan dapat mencapai jumlah ekspor yang potensial (<http://chievpippo.blogspot.co.uk/2010>).

Sejarah Masuknya Islam di Sudan

Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapatkan sambutan baik dari raja Najjasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab dengan mengutus Amr ibn 'Ash. Pasukan muslim dibawah panglima Amr ibn 'Ash berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan tentara Bizantium yaitu pada tahun 639-644 M, dan mendirikan kota Fusthat sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika (M. Abdul Karim, 2009).

Perkembangan Islam semakin kuat sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822. Hampir seluruh warga Sudan utara menganut agama Islam, sedang Sudan bagian selatan hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani (Sophie and Max Lovell-Hoare, 2013) dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran *watsani* (animis).

Masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan moment penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan di benua Afrika dan daratan Eropa yang selama berabad-abad berada dibawah kekuasaan Kristen. Afrika Utara merupakan pintu masuk dari sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan di Afrika Utara dalam peradaban Islam adalah dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi dan intelektual. Di antara tokoh yang terkenal dalam bidang intelektual adalah Ibn Batuta (Biologi), Ibnu Khaldun (sosiologi) dan Ibn Zuhr (Imam Muhsin, 2002).

Sejarah Islam di Sudan dalam perkembangan selanjutnya tidak bisa dipisahkan dengan sebuah gerakan yang disebut sebagai “Imam Mahdi”. Gerakan Imam Mahdi ingin menyadarkan umat Islam di dunia selama abad ke-18 dan ke-19 dan menghasilkan puritanisme. Gerakan ini berpandangan bahwa sudah saatnya umat Islam terbebas dari belenggu ketidakadilan yang menjerat mereka. Dengan idealismenya, mereka ingin mengubah Sudan sesuai dengan konsep tersebut. Sebelum ada gerakan Mahdi, di Sudan sudah ada sufi

Khatmiyya (kadang-kadang disebut Mirghaniyya, sesuai nama pendirinya). Gerakan itu menggabungkan sufi dan kepemimpinan suku. Selama tahun 1821-1885, gerakan sufi Khatmiyya cukup berjaya di wilayah Sudan. Pada waktu yang bersamaan, wilayah Sudan di bawah kekuasaan Turki-Mesir. Oleh karena itu, ketika gerakan Mahdi muncul, ada persaingan dengan Khatmiyya. Para pemimpin Khatmiyya yang didukung oleh kekuasaan Turki, berusaha menghadang pemberontakan Mahdi. Pertikaian antara pendukung Mahdi dan orang-orang Khatmiyya, yang berakar di abad ke-19, terus berlanjut pada pemerintahan berikutnya (Nostalgawan Wahyudhi, 2016).

Pada tahun 1896, pemerintah Inggris menaklukan Sudan dan memberlakukan kontrol terhadap wilayah yang sempat dikuasai oleh kelompok pemberontak al-Mahdi. Pembangunan atas pemerintahan yang baru di Sudan diletakkan berdasarkan perjanjian bersama antara Inggris dengan Mesir pada bulan Januari 1899. Perjanjian tersebut menunjukkan pemerintahan bersama kedua negara yaitu Kondominium Anglo-Egyptian terhadap Sudan (David E. Long and Bernard Reich, 2007). Menurut Mahmood dalam Zaelani, meskipun sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir-Eropa sebagaimana berlaku di negara-negara bekas koloni Inggris lainnya, namun ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (*Qadi al-Qudat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu (Qodir Zaelani, 2012).

Ketika berdiri “Kongres Sarjana” pada 1938, anggota mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang pro-Mahdi dan ada yang pro-Khatmi. Kebanyakan partai politik besar yang muncul pada 1940-an juga berada dalam naungan salah satu dari dua Sayyid tersebut. Tanpa perlindungan itu, mereka akan sulit untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat banyak. Berdirinya asosiasi kaum terdidik muda yang bersandingan dengan dua organisasi keagamaan besar itu, membawa fenomena unik dan berdampak luas pada perkembangan kehidupan masyarakat Sudan. Di satu sisi, hal itu menciptakan situasi di mana keputusan politik tergantung pada pimpinan faksi besar agama. Di sisi lain, itu dapat mendorong kaum elite terpelajar yang aktif berpolitik tetapi tidak mau bergabung dengan salah satu dari dua kelompok keagamaan tersebut, akan membentuk kelompok sendiri yang lebih radikal (Nostalgawan Wahyudhi, 2016).

Selama perang dunia kedua, di Sudan muncul Partai Komunis. Kemudian pada tahun 1954, muncul pula gerakan Ikhwanul Muslimin (IM). Sepuluh tahun kemudian, 1964, gerakan IM mendirikan organisasi politik yang disebut *Islamic Charter Front* (ICF). Organisasi ini kemudian menjadi kekuatan politik yang signifikan dengan berbagai fungsi. ICF mewakili organisasi modern perkotaan, bila dibandingkan dengan sufi tarekat tradisional (Ansar, Khatmiyya dan Partai Umma) (Norman Anderson, 1976).

Pada tahun 1969, ICF mengajukan draft moderat Konstitusi Islam (Peter Woodward, 1990). Usul itu didukung oleh dua sekte sufi, Ansar dan Khatmiyya. Proposal itu diajukan oleh ICF menjelang kudeta militer pimpinan Numairi. Apa yang diinginkan oleh ICF tidak mudah, karena itu harus mengubah Konstitusi. Untuk mengubah Konstitusi yang Islamis, ICF harus berhadapan dengan kelompok lain, Partai Komunis Sudan (CPS), yang menginginkan negara sekuler (John Prendergast, 1997). Akhirnya, Hassan al-Turabi berkolaborasi dengan Jenderal Omar Hasan Ahmad al-Bashir mengambil alih kekuasaan dari Numairi pada 1985. Setelah

penggulingan tersebut, ICF melakukan reorganisasi dan berubah dengan nama *National Islamic Front* (NIF). Turabi membentuk NIF sebagai partai politik bersama-sama dengan sejumlah kelompok Islam. Partai itu menjadi blok ketiga di parlemen pada tahun 1986 (<https://www.meforum.org/meib/issues/9912>).

Kolaborasi Turabi dan Bashir juga membawa mereka ke dalam persaingan politik yang terlalu kentara. Sebenarnya perbedaan pandangan keduanya sudah terlihat tidak lama setelah jatuhnya Numairi. Pada 1 April 1996, dilaksanakan pemilu pertama pasca penumbangan terhadap Presiden Numairi. Ketika itu, ada empat ratus orang terpilih menjadi anggota Majelis Nasional. Omar Bashir terpilih menjadi Presiden Sudan dengan 75,7% suara, dan Hassan al-Turabi terpilih menjadi Ketua Parlemen. Rupanya persaingan politik keduanya tidak dapat dikompromikan lagi. Maka, pada 12 Desember 1999, Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir memberlakukan keadaan darurat dan membubarkan parlemen (Muhammad Tahir, 2013). Sebagai Ketua Parlemen, Turabi pun mengutuk pembubaran parlemen oleh Bashir dan menganggap sebagai “kudeta militer” serta menolak keadaan darurat karena inkonstitusional (<https://www.meforum.org/meib/issues>).

Pendidikan Islam di Sudan

Gambaran Umum Pendidikan di Sudan

Pendidikan formal di Sudan digratiskan dan diwajibkan bagi seluruh anak-anak usia 6 sampai 13 tahun. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar selama delapan tahun, kemudian pendidikan menengah tiga tahun. Jenjang pendidikan diubah menjadi berformat 6 + 3 + 3 pada tahun 1990. Bahasa pengantar pendidikan yang digunakan di semua tingkatan adalah bahasa Arab (Binti Maunah, 2011). Namun lokasi sekolah yang terkonsentrasi di sejumlah daerah perkotaan, yang terletak di bagian selatan dan barat, telah rusak bahkan hancur akibat konflik di negara tersebut (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>).

Adapun pendidikan non formal, terdapat banyak majelis-majelis ilmu yang menggunakan sistem *talaqqi* lewat para *masyaikh* yang tersebar hampir di seluruh penjuru Sudan. Jamaah yang paling eksis dalam model pendidikan ini adalah Jamaah Anshar Sunnah al-Muhammadiyah yang mengajarkan faham *abl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Materi yang diajarkan dalam majelis-majelis ilmu tersebut antara lain: tauhid, tafsir, hadits, fiqih, dan sejarah (Binti Maunah, 2011).

Pada tahun 2001, Bank Dunia memperkirakan bahwa partisipasi murni siswa Sekolah Dasar adalah 46% dan 21 persen dari pelajar sekolah menengah yang terdiri dari siswa yang memenuhi syarat. Tingkat kelangsungan pendidikan di Sudan sangat bervariasi, di beberapa provinsi bahkan hanya mencapai di bawah 20%. Walaupun Sudan memiliki 19 universitas berbahasa Arab, pendidikan di tingkat menengah dan pendidikan tinggi di universitas mengalami masalah penghambat yang serius disebabkan oleh sebagian besar penduduk berjenis kelamin laki-laki melaksanakan dinas militer sebelum dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Menurut perkiraan Bank Dunia, pada tahun 2000 tingkat baca-tulis pada orang dewasa berusia 15 tahun keatas hampir 58% (69% untuk laki-laki, 46 % untuk wanita). Sedangkan pada tahun 2002, tingkat baca-tulis pada orang dewasa berusia 15 tahun keatas mencapai 60% dan tingkat buta aksara pemuda (usia 15-24) diperkirakan sebesar 23%

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>). Kemudian pada tahun 2014 tingkat literasi di negara tersebut mencapai 71.9% (*Human Development Report 2014*).

Berdasarkan paparan di atas, Sudan termasuk dari negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang rendah (*low development index countries*). Krisis multidimensi yang berkepanjangan dan berujung pecahnya Sudan menjadi dua, yaitu Sudan Utara (*Republic of Sudan*) dan Sudan Selatan (*Republic of South Sudan*) memberikan efek negatif terhadap perkembangan pendidikan di Sudan.

Pendidikan Tinggi Islam di Sudan

Sudan memiliki banyak perguruan tinggi yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Di antaranya adalah Khartoum University, Omdurman Islamic University, el-Nilein University, Khartoum International Institute of Arabic, Universitas al-Quran al-Karim, dan yang paling muda adalah International Universitas of Africa (Binti Maunah, 2011).

Sistem Perkuliahan

Secara umum perkuliahan di Sudan menerapkan sistem dua semester. Satu-satunya perguruan tinggi di Sudan yang masih menerapkan sistem satu semester adalah pascasarjana Omdurman Islamic University (<http://www.oiu.edu.sd/en/show>). Banyak keuntungan yang diperoleh dalam sistem dua semester ini yaitu antara lain, bahwa materi yang akan diujikan belum sempat menumpuk dan masih berada di dalam ingatan, sehingga dalam menjawab soal dalam ujian, tingkat akurasi relatif lebih tinggi dari sistem satu semester pertahun.

Bahasa perkuliahan yang dipakai di semua perguruan tinggi di Sudan adalah bahasa Arab fusha. Walaupun di Sudan terdapat bahasa pasaran, akan tetapi mereka selalu melayani orang asing dengan menggunakan bahasa Arab fusha tersebut. Hal ini mungkin tidak diperoleh di negara Arab lain. Selain itu hampir di semua perguruan tinggi Sudan menerapkan sistem hapalan. Malah di berbagai perguruan terutama perguruan tinggi Islam diwajibkan menghafal sejumlah juz al-Quran atau sejumlah hadits, baik untuk tingkat S-1, S-2 dan S-3.

Jadwal perkuliahan untuk program S-1 biasanya mulai bulan September sampai dengan Desember pada semester I, sedang Pebruari sampai bulan Mei untuk semester II. Untuk program S-2 tidak ada jadwal waktu yang tetap untuk semua perguruan. Masing-masing lembaga memiliki jadwal waktu tersendiri sesuai dengan fasilitas yang dimiliki. Sedangkan untuk program S-3 tidak ada lagi tatap muka yang bersifat kolektif dalam kelas. Waktu kuliah biasanya diadakan di pagi hari jam 08:00-14:00 untuk S-1 dan di sore hari jam 14:00-18:00 untuk S-2, kecuali di KIIAL (Khartoum International Institute for Arabic Language) dimana S-2 juga dilaksanakan di pagi hari. Hari libur mingguan adalah hari Jumat; dan untuk S-2 memiliki dua hari libur, Kamis dan Jumat.

Sistem Ujian

Sistem absensi masih diberlakukan secara umum di Sudan. Seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian, bila jumlah kehadirannya kurang dari 75 %. Namun demikian, bila seorang mahasiswa yang dari segi kehadiran tidak berhak ikut ujian, akan diberi dispensasi, bila yang bersangkutan mengajukan surat permohonan dengan alasan yang logis atau mengajukan surat keterangan sakit.

Beban studi yang diujikan berkisar antara 10 sampai 12 materi per semester untuk program S-1 dan 6 sampai 8 materi untuk program S-2 dengan sistem penilaian umum sebagai berikut: *mumtaz* (90-100), *jayyid jiddan* (80-90), *jayyid* (70-80), *maqbul* (60-70), *rashib* (kurang dari 60). Nilai akhir yang diperoleh seorang mahasiswa di akhir semester dan akhir tahun adalah gabungan dari semua nilai dibagi dengan jumlah materi. Untuk mendapatkan gelar sesuai dengan program yang diambil, seorang mahasiswa diwajibkan untuk melakukan riset ilmiah. Betapapun untuk program S-1 tidak diwajibkan menulis skripsi seperti lazimnya di Indonesia, tetapi ia diwajibkan menulis paper untuk beberapa materi kuliah dengan ketebalan antara 5-25 halaman. Sedangkan bagi mahasiswa program S-2 diwajibkan menulis tesis. Ada dua jenis tesis yang biasa diterapkan di beberapa universitas untuk program S-2 yaitu tesis yang bersifat pelengkap (tebalnya 40 halaman dengan literatur minimal 40 buku dan diuji ditempat tertutup) dan yang bersifat berdiri sendiri (tebalnya minimal 75 halaman dan literatur minimal 40 buku dan ujiannya di tempat terbuka). Sebuah tesis bisa diujikan minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun baru dinyatakan kedaluwarsa.

Untuk program S-3 diwajibkan menulis disertasi dengan ketebalan minimal 150 halaman dengan referensi minimal 150 buku. Disertasi diujikan di tempat terbuka setelah diumumkan satu minggu sebelum pelaksanaan ujian. Biasanya sebelum memulai menulis disertasi, mahasiswa diwajibkan mengajukan ringkasan dari 40 literatur utama yang digunakan dalam penulisan disertasi. Ringkasan tersebut diujikan di tempat tertutup oleh tiga orang profesor yang dihadiri oleh dosen pembimbing. Untuk disertasi minimal 3 tahun baru bisa diujikan dan maksimal 6 tahun baru dinyatakan kedaluwarsa.

Perpustakaan

Perguruan tinggi di Sudan mempunyai perpustakaan yang cukup memadai. Selain itu, pemerintah menyediakan perpustakaan umum di pusat kota dengan jumlah buku yang lumayan dan fasilitas cukup baik yang buka setiap hari dari jam 08:00-18:00. Di antara perpustakaan ada juga yang membuat jadwal pelayanan khusus untuk wanita, seperti perpustakaan al-Quran al-Karim and Islamic Sciences University.

Suasana Akademik

Hubungan antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen atau pegawai memang cukup baik tanpa membedakan antara mahasiswa lokal maupun asing. Dosen-dosen di Sudan mempunyai moral yang sangat baik dan pada umumnya *low profile*. Mereka tidak segan-segan menanyakan hasil penulisan mahasiswa di manapun bertemu, baik di kampus ataupun di pasar, maupun di rumah kediaman. Bantuan materiil juga tidak sedikit yang diberikan kepada mahasiswa asing, walaupun sebenarnya rakyat Sudan masih sangat kekurangan.

Dengan kondisi yang telah disebutkan dibatas, maka dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Sudan sangat berkontribusi untuk menimbulkan kemiskinan, kelaparan, pengungsian, instabilitas politik, sekaligus ancaman keamanan internasional. Maka tidak heran jika konflik-konflik tersebut mengundang keterlibatan dari negara-negara non Afrika, seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Eropa (Adam Mynott, 2017). Peristiwa kekerasan, peperangan, dan konflik komunal lainnya memang memiliki akar sejarah yang panjang. Demikian pula halnya dengan Sudan. Sejarah konflik dan kekerasan di negeri yang berbatasan

dengan Mesir ini telah terjadi jauh sebelum negeri ini merdeka di tahun 1956. Konflik kekerasan ini berakar kuat pada identitas agama dan etnik, selain faktor sosial-ekonomi dan perebutan akses sumber daya alam. Identitas agama, kelas sosial, dan etnik, juga punya kontribusi penting dalam menyulut konflik dan kekerasan di Sudan.

Berbagai konflik yang terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal ketimbang internal, sama halnya dengan konflik yang terjadi di Sudan. Sudan sempat goyang akibat konflik Darfur, tetapi saat ini kondisi keamanan dan politik mulai stabil. Meski demikian, Barat selalu berusaha mengganggu stabilitas karena ingin meraup kekayaan alam Sudan, terutama di Darfur (Anonymous, 2017). Penyebab utama kegoncangan dan kerusakan di negeri-negeri tersebut adalah faktor eksternal, yakni penjajahan AS, dan sekutunya.

Sebagaimana diketahui, AS melancarkan imperialismenya di negeri-negeri Muslim melalui dua cara (Andrew S. Natsios, 2017). *Pertama*, melalui intervensi militer, seperti yang sedang dipertontonkan AS di Irak dan Afghanistan. *Kedua*, intervensi non militer yang berupa politik dan ekonomi. Imperialisme seperti inilah yang diterapkan AS dan sekutunya di negeri-negeri Muslim lainnya termasuk Sudan. Alat utama yang digunakan AS untuk memuluskan imperialismenya tersebut adalah globalisasi. Sehingga bagi negara-negara Dunia Ketiga yang *notabene* adalah negeri-negeri Muslim, globalisasi tidak lain adalah imperialisme baru yang menjadi mesin raksasa produsen kemiskinan yang bengis dan tak kenal ampun. Pada dasarnya, globalisasi yang dimotori AS merupakan proses menjadikan sistem ekonomi kapitalis ala AS sebagai sistem dominan di dunia, dengan mengintegrasikan perekonomian lokal ke dalam tatanan perekonomian global melalui privatisasi, pasar bebas, dan mekanisme pasar pada semua perekonomian negara-negara di dunia. Ini berarti penghapusan semua batasan dan hambatan terhadap arus perpindahan barang, modal, dan jasa yang bersandar pada kekuatan pengaruh Amerika Serikat.

Permasalahan di atas, telah memberikan efek domino bagi semua aspek kehidupan di Sudan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Sudan termasuk dalam kategori memprihatinkan (United Nations Development Programme, 2014). Banyak sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat perang, di samping juga biaya pendidikan yang mahal. Oleh karena itu, tidak banyak informasi kemajuan yang berarti yang penulis dapatkan berkaitan dengan pendidikan Islam di Sudan.

Peristiwa di Sudan yang terpecah menjadi dua negara dapat dijadikan *ibrah* betapa pentingnya membangun kebersamaan dan kerukunan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi etnis dan agama. Kondisi Sudan yang multikultural tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia. Para pendiri negara bangsa ini telah menyusun dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD Negara RI 1945 yang jika dilaksanakan secara konsekuen, akan menjadikan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap tegak yang di dalamnya warga muslim hidup bersama dan damai dengan umat agama lain, sesama warga negara atas prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

KESIMPULAN

Sebagai uraian terakhir dalam makalah ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dari semua uraian di dalam pembahasan sebelumnya sebagai berikut:

1. Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris dan Mesir pada 1 Januari 1956. Sejarah Sudan diwarnai konflik dan kekerasan telah terjadi jauh sebelum negeri ini merdeka. Konflik ini berlatar belakang perbedaan agama dan etnik, selain faktor sosial-ekonomi dan perebutan akses sumber daya alam. Referendum yang dilaksanakan 9 Juli 2011 menjadikan Sudan terpecah menjadi dua negara, yaitu Republik Sudan (*Republic of Sudan*) dengan ibu kota Khartoum dan Republik Sudan Selatan (*Republic of South Sudan*) dengan ibu kota Juba.
2. Masuknya Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habasya dan mendapatkan sambutan baik dari raja Najasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar Ibn al-Khattab dengan mengutus Amr ibn 'Ash. Perkembangan Islam semakin kuat sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822. Hampir seluruh warga Sudan utara menganut agama Islam, sedang Sudan bagian selatan hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran *watsani* (animis).
3. Pendidikan formal di Sudan dimulai dari pendidikan dasar selama delapan tahun, kemudian pendidikan menengah tiga tahun. Bahasa pengantar pendidikan yang digunakan di semua tingkatan adalah bahasa Arab. Sudan juga mempunyai banyak universitas ternama yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Namun lokasi sekolah yang terkonsentrasi di sejumlah daerah perkotaan, yang terletak di bagian selatan dan barat, telah rusak bahkan hancur akibat konflik di negara tersebut. Adapun pendidikan non formal, dilaksanakan melalui majelis-majelis ilmu dengan sistem *talaqqi* lewat para *masyaikh* yang tersebar hampir di seluruh penjuru Sudan. Jamaah yang paling eksis dalam model pendidikan ini adalah Jamaah Anshar Sunnah al-Muhammadiyah yang mengajarkan faham *ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Materi yang diajarkan dalam majelis-majelis ilmu tersebut antara lain: tauhid, tafsir, hadits, fiqih, dan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Abdul Rahman Abu Zayed. *Why the Violence?* London: Panos Institute, 1988.
- Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: IKAPI, 2004.
- Anderson, Norman *Law Reform in The Muslim World*. London: The Anholone Press, 1976.
- Anonymous. "South Sudan in Ethiopia-Djibouti Oil Pipeline Deal". <http://www.bbc.com/news/world-africa-16969483>, (6 Mei 2017).
- Bison, Michelle. *Culture of the World Sudan*. Tarrytown: Marshall Cavendish, 1977.
- Bosworth, E. *Dinasti-dinasti Islam*. Bandung: Mizan, 1983.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977.
- Gurdon, Charles. *Instability and the State: Sudan*. London: Macmillan, 1989.
- <http://chievpippo.blogspot.co.uk/2010/02/islam-dan-politik-di-sudan.html>, (26 April 2017).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>, (26 April 2017).
- <https://www.meforum.org/meib/issues/9912.htm>, (26 April 2017).

- http://www.oiu.edu.sd/en/show_page.php?page_id=4, (6 Mei 2017)
- Johnson, Douglas Hamilton. *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace Or Truce*. Kampala: Fountain Publisher, 2011.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Liliweri, M.S. Alo. *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Long, David E. and Bernard Reich, "The Government and Politics of The Middle East and North Africa". *Westview Press* 5th Edition, Vol. 5, (2007).
- Luth, Thohir. M. *Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Martin, Richard. *Encyclopedia Islam & The muslim World*. USA: Macmillan Reference, 2004.
- Maunah, Binti. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Muhsin, Imam. "Peradaban Islam Pra-Modern di Afrika Utara" dalam Siti Maryam, et.al. (eds). *Sejarah Peradaban Islam, Dari Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- Mynott, Adam. "Embargo threatens Sudan Oil Gains". <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3669326.stm>, (6 Mei 2017)
- Natsios, Andrew S. "Darfur: A 'Plan B' to Stop Genocide?". <https://2001-2009.state.gov/p/af/rls/rm/82941.htm>, (2 Mei 2017).
- Prendergast, John. *Crisis Response* London: Pluto Pers, 1997.
- Puradiredja, "Sudan Terbagi Dua Karena Akibat Agama" dalam <http://politik.kompasiana.com/2011/07/09/sudan-terbagi-dua-karena-akibat-agama-377584.html>, (26 April 2017)
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam: Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Reynolds, Paul. "Pressure Builds Over Sudan Embargo". <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6634639.stm>, (6 Mei 2017).
- Ruay, Deng D. Akol. *The Politics of the Two Sudans*. Uppsala: The Scandinavian Institute of African Studies, 1994.
- Sayuti AN, Ahmad. "Belajar Islam di Sudan" dalam Ismatu Ropi dan Kusmana (ed.), *Belajar Islam di Timur Tengah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, t.t.
- Sophie and Max Lovell-Hoare. *South Sudan the Bradt Travel Guide*. USA: The Globe Pequot Press, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Tahir, Muhammad. "Tidak Islamiknya Pembangunan di Negara Islam", *Journal Gjat* Vol. 3 Issue 1 (2013).
- Thohir, Ajid. *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etnolinguistik dan Geopolitik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- United Nations Development Programme. *Human Development Report 2014*. New York: United Nations Development Programme, 2014.
- Wahyudhi, Nostalgawan. "The Problems of the Power of Political Islam in Morocco, Sudan and Somalia". *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 13, No. 2 (2016).
- Woodward, Peter. *Sudan 1989-1989: The Unstable State*. Boulder: Lynne Rienner, 1990.
- Zaelani, Qodir. "Pembaharuan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia". *Journal al-Adalah* No. 3, Vol. 10, (2012).